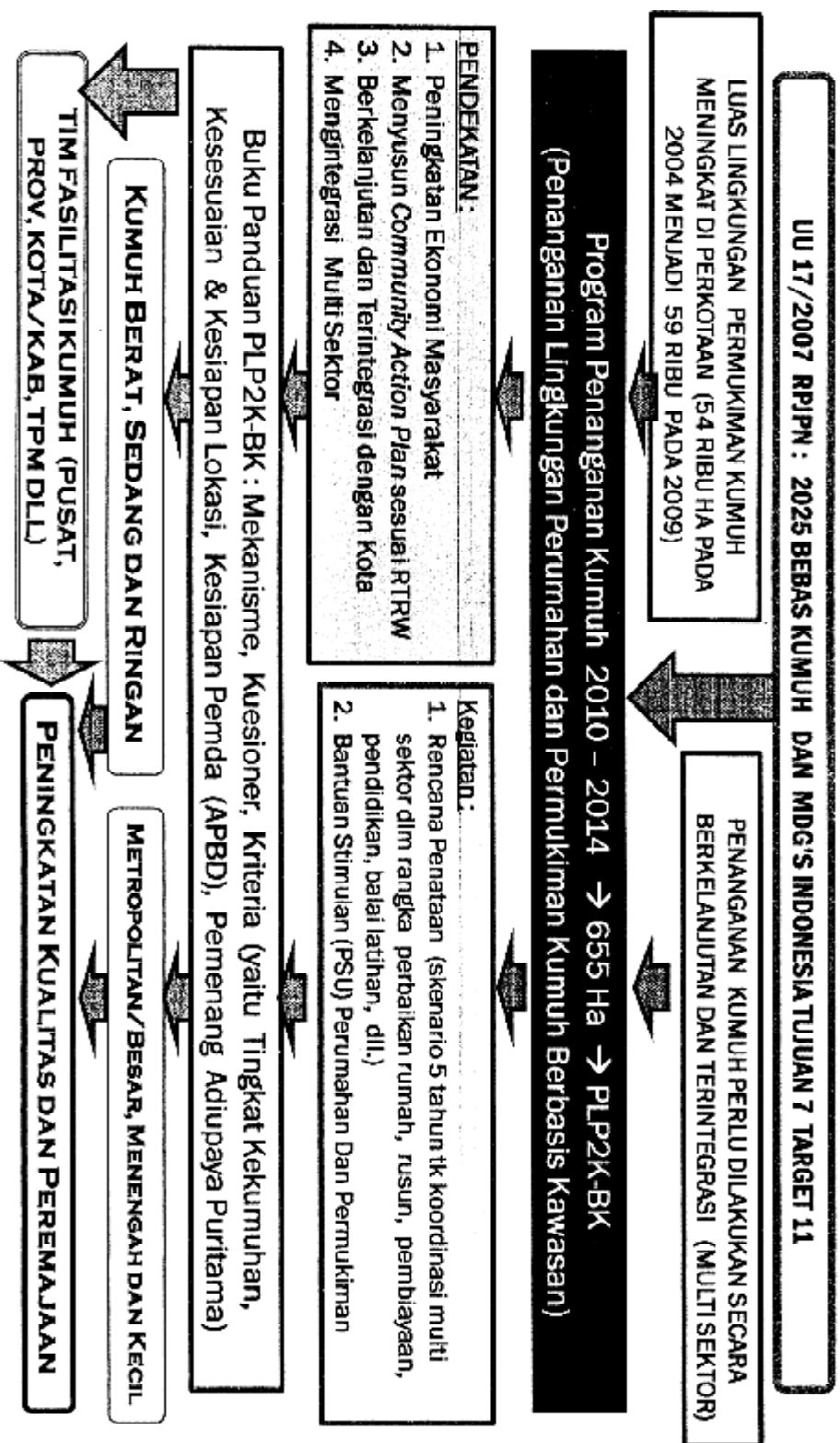


Lampiran 1. PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)



LAMPIRAN II**KUESIONER PENILAIAN****Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten****PENANGANAN LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012**

1) NO. LOKASI*	
2) KABUPATEN/KOTA	
3) PROVINSI	

Keterangan:

* Diharapkan masing-masing kabupaten/kota mengusulkan 3 lokasi calon PLP2K-BK TA 2012

Diisi dengan √

Unit analisis adalah wilayah perencanaan seluas 10 ha

..... 2012

DIISI OLEH,**DIKETAHUI OLEH,**

(.....)

PEJABAT ESKLON III

(.....)

 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA/SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN/KEPALA
 BAPPEDA/KEPALA BAPPEKO/KEPALA
 DINAS TERKAIT

I. DATA LOKASI				
1.1. ADMINISTRASI				
	a. KELURAHAN <i>(dapat diisi lebih dari 1 kelurahan)</i>	1)		
		2)		
		3)		
	b. KECAMATAN <i>(dapat diisi lebih dari 1 kecamatan)</i>	1)		
		2)		
		3)		
	c. KABUPATEN/KOTA <i>(dicoret salah satu)</i>			
	d. PROVINSI			
	e. STATUS KEPEMILIKAN TANAH	<input type="checkbox"/>	1) MILIK PERSEORANGAN	
		<input type="checkbox"/>	2) DIKUASAI PEMERINTAH	
<input type="checkbox"/>		3) LAINNYA,		
1.2. UMUM				
a. LUAS		HEKTAR		
b. JUMLAH RUMAH		UNIT		
c. JUMLAH PENDUDUK		JIWA		
d. JUMLAH KEPALA KELUARGA		KK		
e. DOMINASI PERMUKIMAN <i>(tipologi berdasarkan mata pencaharian)</i>		1) PERMUKIMAN PEKERJA		
		2) PERMUKIMAN NELAYAN		
		3) LAINNYA,		

II. KRITERIA WAJIB		KLASIFIKASI	KETERANGAN
2.1. BENTUK LOKASI	---	1) MENGELOMPOK (<i>CLUSTER</i>)	
	—	2) TERPENCAR (<i>SCATTERED</i>)	
2.2. PERUNTUKAN DALAM RTRW KAB./KOTA		1) HUNIAN	
	---	2) LAINNYA,.....	
2.3. BAGIAN DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH (PENETAPAN PERDA)	—	1) YA	
		2) DALAM PROSES	
		3) LAINNYA,.....	
2.4. APAKAH ADA KETERSEDIAAN DANA APBD UNTUK MENGALOKASIKAN KEGIATAN INI?	—	1) YA	
	---	2) DALAM PROSES	
		3) LAINNYA,.....	
III. KRITERIA KOMPETITIF		KLASIFIKASI	KETERANGAN
3.1. APAKAH PERNAH ADA PROGRAM SERUPA DALAM RANGKA PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH?		1) YA, KEGIATAN.....	
	L	2) LAINNYA,.....	
3.2. DALAM PENANGANAN SEJENIS, APAKAH ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT?	L	1) YA, KEGIATAN.....	
		2) LAINNYA,.....	
3.3. KESEDIAAN UNTUK MENGALOKASIKAN APBD UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM (PASCA STIMULAN)?		1) YA, DENGAN PROPORSI.....%	
	—	2) LAINNYA,.....	

III. KRITERIA KOMPETITIF		KLASIFIKASI	KETERANGAN
3.4. INTENSITAS KEKUMUHAN			
A. KEPENDUDUKAN			
1. TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK			
1.1. KOTA METROPOLITAN	<input type="checkbox"/>	a. > 750 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	b. 700 - 750 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	c. 600 - 700 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	d. 500 - 600 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	e. 250 - 500 jiwa/ha	
1.2. KOTA BESAR	<input type="checkbox"/>	a. > 500 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	b. 450 - 500 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	c. 350 - 450 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	d. 250 - 350 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	e. 150 - 250 jiwa/ha	
1.3. KOTA SEDANG	<input type="checkbox"/>	a. > 250 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	b. 225 - 250 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	c. 200 - 225 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	d. 150 - 200 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	e. 100 - 150 jiwa/ha	
1.4. KOTA KECIL	<input type="checkbox"/>	a. > 150 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	b. 100 - 150 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	c. 75 - 100 jiwa/ha	
	<input type="checkbox"/>	d. 50 - 75 jiwa/ha	

III.	KRITERIA KOMPETITIF	KLASIFIKASI	KETERANGAN
		<div><div></div>e. 25 - 50 jiwa/ha</div>	
2.	JUMLAH RATA-RATA KK PERRUMAH	<div><div>--</div>a. > 4 KK/rumah</div>	
		<div><div></div>b. 4 KK/rumah</div>	
		<div><div>--</div>c. 3 KK/rumah</div>	
		<div><div></div>d. 2 KK/rumah</div>	
		<div><div>L</div>e. 1 KK/rumah</div>	
3.	TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK	<div><div></div>a. > 2,5%</div>	
		<div><div>□</div>b. 2,1 - 2,5%</div>	
		<div><div>□</div>c. 1,6 - 2,0%</div>	
		<div><div>□</div>d. 1,0 - 1,5%</div>	
		<div><div></div>e. < 1,0%</div>	
B. KONDISI BANGUNAN			
1.	TINGKAT KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN (Persentase jumlah rumah semi atau tidak permanen terhadap jumlah rumah total)	<div><div>--</div>a. > 70%</div>	
		<div><div>--</div>b. 51 - 70%</div>	
		<div><div>□</div>c. 31 - 50%</div>	
		<div><div> </div>d. 11 - 30%</div>	
		<div><div></div>e. < 10%</div>	
2.	TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN	<div><div></div>a. > 200 unit/ha</div>	
		<div><div>--</div>b. 151 - 200 unit/ha</div>	
		<div><div>--</div>c. 101 - 150 unit/ha</div>	
		<div><div></div>d. 51 - 100 unit/ha</div>	

			e. < 50 unit/ha
3.	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH (Persentase jumlah rumah yang rusak terhadap jumlah rumah total)	—	a. 51 - 70%
		—	b. 31 - 50%
		—	c. 11 - 30%
		—	d. < 10%
		—	e. 51 - 70%
C. KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS			
1.	TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH (Persentase jumlah KK yang tidak terlayani air bersih terhadap jumlah KK total)	—	a. > 70%
		—	b. 51 - 70%
		—	c. 31 - 50%
		—	d. 11 - 30%
		—	e. < 10%
2.	KONDISI SANITASI LINGKUNGAN (Persentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban terhadap jumlah KK total)	—	a. > 70%
		—	b. 51 - 70%
		—	c. 31 - 50%
		—	d. 11 - 30%
		—	e. < 10%
3.	KONDISI PELAYANAN PERSAMPAHAN (Persentase jumlah KK yang sampahnya belum terlayani terhadap jumlah KK total)	—	a. > 70%
		—	b. 51 - 70%
		—	c. 31 - 50%
		—	d. 11 - 30%
		—	e. < 10%

4.	KONDISI SALURAN AIR HUJAN/DRAINASE - Jika memiliki drainase, persentase panjang drainase yang tidak lancar atau tersumbat terhadap panjang drainase total - Jika tidak memiliki drainase, persentase luasan air limpasan (<i>run off</i>) terhadap panjang drainase total	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
5.a.	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (Presentase panjang jalan rusak berat terhadap panjang jalan total)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. < 30%	
5.b.	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (Presentase panjang jalan rusak sedang terhadap panjang jalan total)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. < 30%	
5.c.	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (Presentase panjang jalan rusak ringan terhadap panjang jalan total)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. < 30%	
6.	JUMLAH RUANG TERBUKA (Persentase luas ruang terbuka terhadap luas seluruh kawasan perumahan dan permukiman)	<input type="checkbox"/>	a. < 2,5%	
		<input type="checkbox"/>	b. 2,5 - 5%	
		<input type="checkbox"/>	c. 5 - 7,5%	
		<input type="checkbox"/>	d. 7,5 - 10%	
		<input type="checkbox"/>	e. > 10%	

3.5. INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

1.	TINGKAT PENDAPATAN (Persentase jumlah penduduk berpenghasilan di bawah upah minimum terhadap jumlah penduduk)	---	a. > 35%	
		---	b. 26 - 35%	
		---	c. 16 - 25%	
		---	d. 6 - 15%	
		---	e. < 6%	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN (Persentase jumlah penduduk yang tidak tamat wajib belajar 9 tahun terhadap jumlah penduduk)	---	a. > 15%	
		---	b. 11 - 15%	
		---	c. 6 - 10%	
		---	d. 1 - 5%	
		---	e. 0%	
3.	TINGKAT KERAUWANAN KRIMINAL (Jumlah tindakan kriminal dalam 1 tahun)	---	a. > 6 kali/tahun	
		---	b. 5 - 6 kali/tahun	
		---	c. 3 - 4 kali/tahun	
		---	d. 1 - 3 kali/tahun	
		---	e. 0 kali/tahun	
4.	STATUS GIZI BALITA (Presentase jumlah balita yang kurang gizi terhadap jumlah keseluruhan balita)	---	a. > 70%	
		---	b. 51 - 70%	
		---	c. 31 - 50%	
		---	d. 11 - 30%	
		---	e. < 10%	

5.	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH (Persentase jumlah penderita demam berdarah dalam setahun terhadap jumlah penduduk)	<input type="checkbox"/>	a. > 20%	
		<input type="checkbox"/>	b. 16 - 20%	
		<input type="checkbox"/>	c. 11 - 15%	
		<input type="checkbox"/>	d. 6 - 10%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 5%	
6.	ANGKA KESAKITAN DIARE (Persentase jumlah penderita diare dalam setahun terhadap jumlah penduduk)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
7.	ANGKA KESAKITAN ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS) (Persentase jumlah penderita ISPA dalam setahun terhadap jumlah penduduk)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
8.	FREKUENSI KEBAKARAN	<input type="checkbox"/>	a. > 7 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	b. 5 - 7 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	c. 3 - 4 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 2 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	e. 0 kali/tahun	
9.	FREKUENSI BANJIR	<input type="checkbox"/>	a. > 7 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	b. 5 - 7 kali/tahun	

		<input type="checkbox"/>	c. 3 - 4 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 2 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	e. 0 kali/tahun	
10.	FREKUENSI TANAH LONGSOR/3 TAHUN	<input type="checkbox"/>	a. > 7 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	b. 5 - 7 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	c. 3 - 4 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 2 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	e. 0 kali/3 tahun	

IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER

1. POTENSI APAKAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI LOKASI AGAR BERSINERGI DENGAN SISTEM KOTA?

(Misalnya karena lokasi dekat dengan kawasan industri, maka berpotensi untuk pengembangan rumah sewa pekerja di lokasi tersebut)

Jawab:

2. BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGAN KESIAPAN LOKASI?

(Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmen pemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan)

Jawab:

3. ADAKAH PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI DAPAT MENGHAMBAT/MENGACAU KEBERHASILAN PENANGANAN PLP2K-BK?

(Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan)

Jawab:

IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER

4. APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI KEGIATAN SERUPA, MISALNYA NUSSP (*NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT*), SAPOLA (*SLUM ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN*), DST?

Jawab:

5. APAKAH DI LOKASI SUDAH ADA ORGANISASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIKEMBANGKAN/DIMANFAATKAN UNTUK BERFUNGSI MENJADI BADAN KESWADAYAMAN MASYARAKAT (BKM)?

Jawab:

- a. Jika ada, apakah saat ini organisasi tersebut masih aktif dan menangani kegiatan apa? _____

- b. Jika tidak ada, (agar didiskusikan dengan pemerintah daerah setempat agar memfasilitasi organisasi masyarakat yang ada untuk dibentuk sebagai BKM)

6. BAGAIMANA KESIAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN TA 2012?

Jawab:

- a. Siap ditangani pada TA 2012, karena _____

- b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA 2012, karena _____

LAMPIRAN III

FORM A

KOP PEMERINTAH PROVINSI

No. :
 Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Gedung Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Lt.II, Wing.2

Jalan Raden Patah I No.1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

**Perihal : Usulan Pemerintah Provinsi Untuk Lokasi Penanganan
 Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan
 TA**

Dalam rangka meningkatkan kawasan perumahan khususnya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi..... kabupaten/kota, dan sesuai dengan program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, sebagai berikut:

- a. Penanganan pada Tahun Anggaran
 - Lokasi di Kabupaten/Kota
 - Lokasi di Kabupaten/Kota
- b. Penanganan pada Tahun Anggaran selanjutnya
 - Lokasi di Kabupaten/Kota
 - Lokasi di Kabupaten/Kota

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kabupaten/kota
- Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi

.....

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Walikota/Bupati
5. Arsiparis.

LAMPIRAN III

FORM B

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Gubernur.....
 di -

**Perihal : Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Lokasi
 Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 Berbasis Kawasan TA**

Dalam rangka meningkatkan kawasan perumahan khususnya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi..... kabupaten/kota, dan sesuai dengan program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten/kota pada tahun anggaran, sebagai berikut:

- Lokasi
- Lokasi
- Lokasi

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kabupaten/kota
- Kuesioner
- Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota
- Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Peretapan Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh
- Surat Pernyataan Bupati/Walikota tentang kesediaan bekerjasama pada pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK
- Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh
- Foto-foto dan data pendukung lainnya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota

.....

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Arsiparis.

LAMPIRAN III

FORM C

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut:

- Alasan pemilihan lokasi
- Kesiadaan pengalokasian dana APBD
- Kesiadaan memfasilitasi dan menyiapkan rencana dan program yang mendukung kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh

Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi materi pokok di atas:

KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN
LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh:
- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
 - c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota.....
 - e. dst

- Mengingat : dst, sebagai contoh:
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004, tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : dst, sebagai contoh:
 "KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG LOKASI
 PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN/KOTA....."
- Kesatu : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;
- Kedua : Pemerintah Kabupaten/Kotabersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran sampai dengan tuntasnya penanganan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- dan seterusnya....

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Bupati/Walikota

.....

- I. Lampiran : Keputusan Bupati/Walikota
- II. Nomor :
- III. Tanggal :
- IV. Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten/Kota
- V.

No	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Walikota

.....

LAMPIRAN III

FORM D

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN WALIKOTA/BUPATI.....

"Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran, maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota..... menyatakan:

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan PLP2K-BK;
2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah;
3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kota/kabupaten..... dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan PLP2K-BK;
4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM);
5. Bersama dengan TPM memfasilitasi terbentuknya kelompok aparat masyarakat dan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat/ *Community Action Plan* (RTK/CAP);
6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota tim gabungan koordinasi dan tim teknis penyusunan rencana PLP2K-BK;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kemenpera dalam pelaksanaan PLP2K-BK;
8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan PLP2K-BK sesuai dengan RTK/CAP dan Rencana PLP2K-BK yang telah disusun, setelah kegiatan stimulan dari Kemenpera selesai.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya".

.....
Bupati/Walikota

.....